

MENAKAR ORIENTASI POLITIK KALANGAN MINORITAS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

Asmadi ^a, Fuzy Firda Zhan ^b

^{a&b} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
E-mail: fuzy.firda@fisip.untan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi politik kalangan minoritas dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2024. Orientasi politik kalangan minoritas menjadi penting untuk dikaji mengingat posisi mereka yang kerap terpinggirkan dalam dinamika politik lokal, khususnya di daerah dengan keragaman etnis dan agama seperti Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi politik kalangan minoritas di Kabupaten Sambas mengalami perubahan menuju pola yang lebih rasional dan partisipatif. Pada dimensi kognitif, kelompok minoritas mulai memahami mekanisme politik lokal dan menilai calon berdasarkan visi, kinerja, serta program kerja, bukan semata faktor etnisitas. Pada dimensi afektif, mereka menunjukkan sikap positif terhadap simbol dan institusi demokrasi, serta menumbuhkan rasa percaya terhadap proses politik yang lebih inklusif. Sementara pada dimensi evaluatif, minoritas menilai politik sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, akuntabel, dan menjunjung kesetaraan. Temuan ini menegaskan bahwa literasi politik memiliki peran strategis dalam memperkuat partisipasi dan kesadaran politik kelompok minoritas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendidikan politik yang inklusif dan kolaboratif guna memperkuat demokrasi substantif di Kabupaten Sambas yang setara.

Kata Kunci: literasi politik, minoritas, orientasi politik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the political orientation of minority groups in the 2024 Sambas Regency Election for Regent and Vice Regent. Examining the political orientation of minorities is essential, given their often marginalized position in local political dynamics, particularly in regions characterized by ethnic and religious diversity such as Sambas Regency. This research employs a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and literature review. The findings reveal that the political orientation of minority groups in Sambas Regency has shifted toward a more rational and participatory pattern. In the cognitive dimension, minority groups have begun to understand the mechanisms of local politics and assess candidates based on their vision, performance, and policy programs rather than ethnic affiliation. In the affective dimension, they exhibit positive attitudes toward democratic symbols and institutions, fostering greater trust in a more inclusive political process. Meanwhile, in the evaluative dimension, minorities perceive politics as a means to achieve just, accountable governance that upholds equality. These findings emphasize the strategic role of political literacy in strengthening the participation and political awareness of minority groups. The study recommends the development of inclusive and collaborative political education to reinforce substantive democracy and promote equality in Sambas Regency.

Keywords: political literacy, minorities, political orientation.

* Corresponding Author.

E-mail: fuzy.firda@fisip.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Pemilu (Pemilihan Umum) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan dua bentuk mekanisme demokratis di Indonesia yang dirancang untuk menjamin partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin serta perwakilan politik secara langsung. Pemilu diselenggarakan secara nasional setiap lima tahun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Lebih spesifik lagi, Pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi lokal yang memberikan kewenangan kepada rakyat di daerah untuk memilih kepala daerah secara langsung, termasuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan Pilkada diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) di tingkat daerah sebagai penyelenggara teknis, serta oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk pengawasan pemilu di tingkat daerah. Namun, dalam praktiknya, Pilkada juga sering mencerminkan ketimpangan politik, terutama bagi kelompok minoritas yang kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap ruang politik, baik dalam hal pencalonan maupun dalam menentukan preferensi pilihan (Yuliani & Ardianto, 2020). Kajian mengenai partisipasi dan orientasi politik kalangan minoritas dalam Pilkada menjadi penting untuk menilai sejauh mana demokrasi lokal menjamin keterwakilan dan keadilan politik.

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang kesukumannya bersifat heterogen. Suku dan etnis yang mendiami wilayah ini meliputi Suku Dayak, Suku Melayu, Etnis Tionghoa, Suku Jawa, Suku Madura, dan lainnya. Menurut sensus tahun 2010, kelompok etnis yang dominan di Kalimantan Barat adalah etnis Dayak (49.91%) yang diikuti oleh etnis Melayu (16.50%) yang mayoritasnya bermukim di pesisir (Mardiyanti, Ramadhan, & Kurnia, 2023). Komposisi kelompok etnis ini merupakan faktor laten yang melekat dalam struktur masyarakat Kalimantan Barat. Salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang mayoritas penduduknya adalah keturunan suku Melayu adalah Kabupaten Sambas (Akbar & Sukmawati, 2019). Kabupaten Sambas sebagai salah satu daerah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat memiliki karakteristik sosial yang heterogen dengan keberadaan berbagai kelompok etnis. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial dan politik yang kompleks yakni adanya interaksi antar kelompok etnis memengaruhi pola partisipasi dan orientasi politik masyarakat. Identitas kultural dan pengalaman historis antar komunitas turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap pemerintahan dan proses demokrasi lokal.

Kondisi sosial yang majemuk tersebut menuntut adanya pemahaman mendalam mengenai komposisi etnis sebagai dasar untuk membaca dinamika politik lokal. Melalui data demografis, dapat diketahui bagaimana persebaran dan proporsi masing-masing kelompok etnis yang berpotensi memengaruhi orientasi politik masyarakat dalam setiap kontestasi elektoral. Data resmi mengenai persentase suku di Kabupaten Sambas terbaru belum tersedia secara rinci dalam publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas, namun catatan statistik mengenai data persentase suku di Kabupaten Sambas yang dapat diperoleh publik tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas Berdasarkan Suku Tahun 2010

No	Suku Bangsa	Jumlah (Jiwa)
1.	Melayu Sambas	356.442
2.	Cina	49.063
3.	Jawa	12.677
4.	(Dayak) Kendayan	12.491
5.	Melayu Pontianak	911
6.	Darat	1.467
7.	Madura	75
8.	Pesaguan	109
9.	Lainnya	20.795
Total		454.030

Sumber: BPS RI, 2021

Suku/etnis mayoritas berdasarkan data tersebut yakni Melayu Sambas dan Cina (Tionghoa). Meski demikian, terdapat proyeksi bahwa di beberapa wilayah, etnis Tionghoa justru menjadi minoritas. Hal tersebut berdasarkan data dari Kanwil Depag 1995 dan Kanwil Depdikbud Kalimantan Barat 1991 (Mananta, 2017; diolah oleh peneliti) persebaran etnis Tionghoa terbesar ada di Kecamatan Pemangkat (40,07%). Sementara itu di beberapa kecamatan berada pada persentase kecil seperti di Paloh (11,8%) Sambas (13,1%), Sejangkung (2,41%), Selakau (18,83%), Tebas (15,8%), dan Teluk Keramat (2,39%) (Purwana, 2018).

Fenomena suku Tionghoa sebagai minoritas dalam Pilkada ini mencerminkan dinamika politik identitas, relasi mayoritas-minoritas, serta konstruksi kewargaan dalam ruang demokrasi lokal. Dalam ruang dan waktu tertentu, hubungan antarkelompok yang ada dapat membentuk konfigurasi relasi kekuasaan dan hubungan mayoritas-minoritas yang berbeda. Konfigurasi sosial ini bersinggungan dengan dimensi politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang di Kalimantan Barat dan di Indonesia. Di tengah konfigurasi sosial tersebut, dinamika politik lokal tidak jarang memperlihatkan ketimpangan representasi dan partisipasi, khususnya bagi kalangan minoritas (SPNK THC, 2015).

Setelah menelaah dinamika politik identitas dan posisi suku Tionghoa sebagai kelompok minoritas dalam Pilkada Kabupaten Sambas, penting untuk melihat bagaimana realitas politik tersebut tercermin dalam hasil elektoral terkini. Salah satu instrumen yang dapat memberikan gambaran awal mengenai preferensi pemilih dan kekuatan politik kandidat adalah hasil hitung cepat (*quick count*). Metode ini, meskipun bukan hasil resmi, kerap dijadikan tolok ukur awal oleh publik, media, dan pengamat politik untuk membaca arah kemenangan serta respons masyarakat terhadap isu-isu identitas, kinerja, dan strategi kampanye. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hasil *quick count* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2024 menjadi relevan untuk memahami konfigurasi politik lokal yang sedang berlangsung. Hasil *quick count* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas Berdasarkan Suku Tahun 2010

NO	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah DPT	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	SAH (S)	Tidak Sah (T)	Hak Pilih (S+T)	GOLPUT
1	Tekarang	29	12948	3620	4003	483	8106	167	8273	4675
2	Teluk Keramat	129	55738	14915	19849	1869	36633	872	37505	18233
3	Tangaran	44	19488	5647	8959	646	15252	407	15659	3769
4	Selakau	57	26806	6801	9759	1086	17646	425	18071	8735
5	Salatiga	29	13801	3178	4691	642	8511	258	8769	5032
6	Selakau Timur	27	11887	3017	4190	511	7718	187	7905	3982
7	Semparuk	42	21858	6463	6586	922	13971	387	14358	7500
8	Sebawi	37	14548	4276	5063	524	9863	241	10104	4444
9	Tebas	113	57487	17578	17970	1447	37005	924	37929	19558
10	Sajad	20	10060	2842	2269	845	5956	126	6082	3978
11	Sambas	48	24882	6188	8528	1796	16512	464	16976	7906
12	Jawai	68	33962	8055	8386	3727	20118	464	20582	13380
13	Jawai Selatan	43	17149	4655	5336	1003	10994	268	11262	5887
14	Pemangkat	74	37129	8930	11583	993	21506	511	22017	15112
15	Paloh	43	17448	4331	6131	1068	11530	292	11822	5626
16	Sajingan Besar	26	8811	1634	6013	251	7898	243	8141	4197
17	Sejangkung	44	18495	5534	5384	995	11913	353	12266	6229
18	Galing	48	18479	4688	6613	1042	12343	254	12597	5882
19	Subah	51	16956	3577	6399	589	10565	455	11020	5936
TOTAL		1007	458025	126577	145007	20572	292156	7377	299533	158492

Sumber: KPU Kabupaten Sambas, 2024

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas Nomor 1663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024, hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. Satono, S.Sos., M.H. dan H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T. dengan perolehan suara sebanyak 142.909. Hasil perolehan suara terbanyak kedua didapatkan oleh pasangan calon nomor urut 1 atas nama Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc. dan Dr. Sabib, S.T., M.T. dengan perolehan suara sebanyak 125.863. Hasil perolehan suara di tempat ketiga diisi oleh pasangan calon nomor urut 3 atas nama Misni Safari, S.P., M.E. dan H. Mariadi, S.E., M.M. dengan perolehan suara sebanyak 20.470. Adapun hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas 2024

Sumber: KPU Kabupaten Sambas, 2024

Ketiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas ini merupakan putra daerah Sambas. Paslon 1, Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc. berdarah Suku Melayu Sambas sekaligus anak dari bupati pertama Kabupaten Sambas setelah pemekaran dan Dr. Sabib, S.T., M.T. berdarah Suku Melayu Sambas. Paslon 2, H. Satono, S.Sos., M.H. merupakan putra daerah Sambas yang berdarah etnis Tionghoa dan H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T. berdarah Suku Melayu Sambas dari keluarga pendiri Pencak Silat Kijang Berantai Sambas. Paslon 3, Misni Safari, S.P., M.E. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sambas 2021—2026 dan H. Mariadi, S.E., M.M. berdarah Suku Melayu Sambas.

Melihat hasil akhir Pilkada Sambas Tahun 2024 yang menampilkan kompetisi ketat antara dua pasangan calon utama, penting untuk menelaah lebih dalam dinamika politik yang berlangsung di balik perolehan suara tersebut. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana kelompok-kelompok masyarakat, khususnya yang berada dalam posisi minoritas, menentukan pilihan politik mereka di tengah kontestasi tersebut. Orientasi politik kalangan minoritas, seperti etnis Tionghoa dan kelompok non-dominan lainnya, menjadi cerminan dari sejauh mana demokrasi lokal mampu mengakomodasi keragaman aspirasi serta menjamin inklusivitas dalam proses pemilihan kepala daerah.

Orientasi politik pemilih minoritas khususnya etnis Tionghoa di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Meskipun memiliki peran dominan dalam sektor ekonomi, keterlibatan mereka dalam politik sering kali terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan struktural dan sosial yang menghambat partisipasi aktif mereka dalam proses politik.

Salah satu studi yang menyoroti hal ini adalah penelitian oleh Fauzi et al (2022), yang menunjukkan bahwa partisipasi politik etnis Tionghoa cenderung dipengaruhi oleh persepsi keuntungan yang akan diperoleh. Jika mereka merasa diuntungkan oleh proses politik, mereka akan berpartisipasi aktif. Sebaliknya, jika tidak, mereka cenderung apatis. Selain itu, penelitian oleh Yuliani dan Ardianto (2020) mengungkapkan bahwa kandidat dari kelompok minoritas dapat memenangkan Pilkada dengan memanfaatkan modal sosial, ekonomi, dan politik secara efektif. Strategi ini memungkinkan mereka untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa politik identitas masih menjadi tantangan dalam demokrasi Indonesia. Kelompok minoritas sering kali menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik, yang menghambat mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Untuk memahami lebih lanjut mengenai orientasi politik pemilih minoritas di Kabupaten Sambas, diperlukan penelitian lapangan yang mendalam. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor spesifik yang memengaruhi pilihan politik mereka dan bagaimana mereka menavigasi dinamika politik lokal yang kompleks. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana orientasi politik kalangan minoritas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2024.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan topik yang diangkat oleh peneliti pada penelitian kali ini di antaranya yaitu penelitian mengenai *Orientasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam Penguatan Komitmen Kebangsaan* (Suhaida, 2015) yang dikaji berdasarkan perspektif ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Kajian lainnya yaitu pada penelitian mengenai *Orientasi Politik Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024 Di SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai* (Nurdin, Hamim, & Mahmud, 2023). Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa orientasi politik pemilih pemula menjelang pemilu 2024 tergolong pada orientasi politik yang negatif.

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis orientasi politik kalangan minoritas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2024 ini memiliki urgensi (keutamaan) pada pentingnya memahami orientasi politik kalangan minoritas dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2024, mengingat peran strategis mereka dalam dinamika politik lokal yang kerap terpinggirkan dalam wacana arus utama. Kabupaten Sambas merupakan wilayah dengan keberagaman etnis dan agama yang tinggi,

sehingga orientasi politik minoritas menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip inklusivitas, representasi, dan keadilan sosial diwujudkan dalam proses demokrasi lokal.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini yakni digunakannya pendekatan analitis dengan menggabungkan teori orientasi politik Almond dan Verba dengan kondisi sosial-politik lokal Kabupaten Sambas, sesuatu yang belum dilakukan secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru mengenai pergeseran pemilih minoritas dari pola orientasi berbasis identitas menuju perilaku politik yang lebih rasional. Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang dinamika politik inklusif di daerah yang multikultural seperti Kabupaten Sambas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Sambas. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan permasalahan yang ada yaitu Kabupaten Sambas dikenal sebagai wilayah multikultural yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis seperti Melayu, Dayak, Tionghoa, dan Madura, serta komunitas agama yang beragam. Keberagaman ini menjadikan Sambas sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana identitas minoritas memengaruhi orientasi politik.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk menginterpretasikan temuan secara mendalam. Selanjutnya, subjek penelitian dalam penelitian ini yakni (1) KPU Kabupaten Sambas, (2) tokoh masyarakat Kabupaten Sambas, (3) pemilih dari kalangan minoritas, dan (4) akademisi/pengamat politik Kabupaten Sambas. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Selanjutnya, data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam (*in depth interview*), studi dokumentasi, dan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Orientasi Politik dan Politik Minoritas

Secara etimologis, istilah “orientasi” berasal dari bahasa Latin *oriens*, yang berarti timur atau arah matahari terbit. Dalam pengembangan makna modern, orientasi diartikan sebagai kecenderungan atau sikap seseorang terhadap suatu objek atau sistem. Di dalam studi ilmu politik, orientasi politik merujuk pada kecenderungan individu atau kelompok dalam memahami, merespons, serta berpartisipasi dalam sistem politik dan proses-proses demokratis. Konsep ini penting untuk menganalisis bagaimana kelompok sosial tertentu termasuk kalangan minoritas dalam membangun preferensi dan sikap terhadap kekuasaan politik, partai, dan kandidat (Juliansyah, 2021).

Menurut Almond dan Verba, orientasi politik terdiri dari tiga dimensi: (1) kognitif, yaitu pengetahuan tentang sistem politik dan aktor-aktornya; (2) afektif, yakni perasaan terhadap simbol-simbol, lembaga, dan tokoh politik; serta (3) evaluatif, yaitu penilaian normatif atas sistem dan kinerjanya. Dimensi ini menjadi kerangka analitis dalam memahami perilaku politik, termasuk pada kelompok minoritas yang kerap memiliki sejarah relasi yang kompleks dengan negara dan elite politik (Meilinda, 2021). Pada penelitian yang berlokasi Kabupaten Sambas ini, orientasi politik kalangan minoritas dapat dianalisis melalui pengalaman historis, representasi politik, serta perasaan keterlibatan atau justru keterpinggiran dalam kontestasi politik lokal.

Layungsari et al. (2024) menunjukkan bahwa orientasi politik banyak dipengaruhi oleh agen sosialisasi seperti keluarga, komunitas keagamaan, dan media lokal. Di wilayah yang plural seperti Kabupaten Sambas, relasi etnis dan keagamaan memainkan peran penting dalam pembentukan orientasi politik. Supriyadi (2019) menekankan bahwa dalam masyarakat multikultural, pemilih dari kelompok minoritas sering membentuk orientasi politik berdasarkan rasa solidaritas, identitas kelompok, dan pengalaman diskriminasi atau marginalisasi. Ini dapat menjelaskan kecenderungan *voting block* atau perilaku memilih berdasarkan identitas kolektif, alih-alih semata-mata rasionalitas programatik (Kafka et al., 2022).

Identifikasi partai juga menjadi bagian penting dari orientasi politik. Apaut et al. (2018) menemukan bahwa loyalitas politik seringkali diturunkan melalui keluarga dan komunitas, termasuk di kelompok minoritas. Faktor ideologis turut membentuk orientasi politik kalangan minoritas. Nugroho et al. (2022) menunjukkan bahwa pemilih dengan latar belakang identitas spesifik cenderung memiliki pandangan ideologis yang dipengaruhi oleh dinamika hubungan mayoritas-minoritas, termasuk dalam isu keadilan sosial, kebijakan afirmatif, dan perlindungan hak sipil. Di Kabupaten Sambas, sejarah konflik sosial masih menjadi memori kolektif, faktor ideologi dan posisi politik bisa memiliki muatan emosional yang kuat.

Selain itu, orientasi politik minoritas juga mencerminkan resistensi atau dukungan terhadap sistem politik yang dianggap adil atau tidak. Meilinda (2021) menjelaskan bahwa jika sistem politik dianggap tidak memberi ruang yang cukup bagi partisipasi minoritas, maka orientasi politik cenderung skeptis dan berujung pada apatisme atau resistensi. Sebaliknya, ketika ada representasi politik dari kalangan minoritas, orientasi politik bisa menjadi lebih partisipatif dan terbuka.

2. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di bagian paling utara dan berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian Sarawak). Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2023 berjumlah sekitar 648,18 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 101 jiwa per kilometer persegi atau 3.324 jiwa per desa (BPS Kabupaten Sambas, 2024).

Posisi geografis yang strategis serta karakter sosial masyarakat yang hidup dalam ruang interaksi lintas batas menjadikan Sambas sebagai wilayah dengan dinamika sosial-politik yang kompleks. Mobilitas masyarakat yang tinggi serta hubungan sosial-ekonomi dengan wilayah perbatasan turut memengaruhi pola interaksi antar-etnis dan antar-agama. Kondisi tersebut menciptakan ruang pertemuan yang intens, di mana identitas kelompok dapat saling bernegosiasi maupun beradaptasi dengan kebutuhan sosial-politik yang lebih luas.

Selain komposisi penduduk secara keseluruhan, karakteristik demografis yang berkaitan dengan persebaran wilayah dan latar belakang keagamaan juga menjadi aspek penting dalam memahami dinamika sosial dan politik lokal di Kabupaten Sambas. Variasi jumlah penduduk di tiap kecamatan serta keragaman agama yang dianut masyarakat memberikan gambaran lebih utuh mengenai struktur sosial daerah ini. Informasi tersebut tidak hanya relevan untuk melihat pola persebaran kelompok mayoritas dan minoritas, tetapi juga penting dalam menganalisis bagaimana orientasi politik masyarakat terbentuk berdasarkan kondisi sosial kewilayahan. Adapun sebaran jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Sebaran Penduduk Berdasarkan Agama Di Kabupaten Sambas (2023)

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Selakau	34.085,00	192,00	113,00	0,00	3.850,00	276,00
Selakau Timur	13.243,00	95,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pemangkat	39.664,00	703,00	869,00	6,00	9.444,00	1.883,00
Semparuk	28.227,00	83,00	73,00	5,00	1.612,00	267,00
Salatiga	17.423,00	103,00	20,00	1,00	1.686,00	99,00
Tebas	69.348,00	2.435,00	2.549,00	5,00	7.501,00	145,00
Tekarang	17.900,00	30,00	5,00	0,00	355,00	15,00
Sambas	53.441,00	843,00	1.492,00	9,00	4.234,00	113,00
Subah	16.268,00	4.090,00	4.131,00	136,00	81,00	1,00
Sebawi	19.465,00	105,00	46,00	0,00	1.475,00	73,00
Sajad	14.243,00	2,00	3,00	0,00	10,00	0,00
Jawai	46.785,00	181,00	52,00	1,00	1.310,00	12,00
Jawai Selatan	17.647,00	158,00	62,00	7,00	3.982,00	82,00

Teluk Keramat	74.619,00	343,00	290,00	4,00	1.113,00	33,00
Galing	25.925,00	11,00	61,00	1,00	4,00	0,00
Tangaran	26.457,00	5,00	5,00	0,00	6,00	0,00
Sejangkung	27.622,00	57,00	62,00	0,00	132,00	1,00
Sajingan Besar	1.794,00	2.259,00	8.611,00	0,00	36,00	0,00
Paloh	29.292,00	410,00	220,00	0,00	1.338,00	9,00
Kabupaten Sambas	573.448,00	12.105,00	18.687,00	175,00	38.174,00	3.009,00

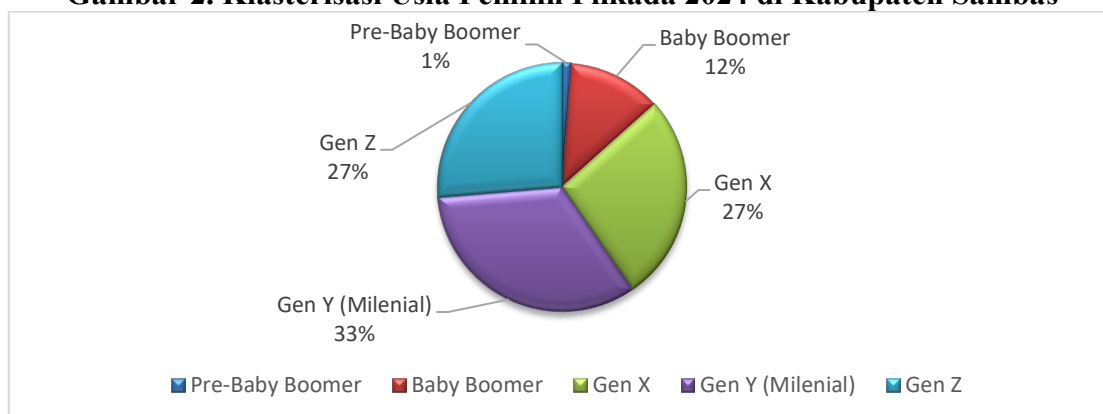
Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2024

Agama mayoritas yang dianut di setiap kecamatan rata-rata adalah Islam kecuali di Kecamatan Sajingan Besar yang agama mayoritas penduduknya adalah Katholik dan Protestan. Keberagaman etnis dan agama ini membentuk struktur sosial yang kompleks dan menjadi faktor penting dalam memahami orientasi politik masyarakat, terutama kalangan minoritas. Kemudian dari aspek sosial, masyarakat Sambas dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Keberagaman etnis seperti Melayu, Dayak, Tionghoa, Madura, dan Bugis juga menghadirkan dinamika tersendiri dalam kehidupan sosial-politik.

Secara politik, Kabupaten Sambas memiliki sejarah panjang dalam dinamika demokrasi lokal di Kalimantan Barat. Sejak pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, kompetisi politik di Sambas cenderung dinamis dan melibatkan berbagai figur lokal dengan basis dukungan etnis dan kultural yang kuat. Partai politik yang berpengaruh di wilayah ini berdasarkan jumlah anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas antara lain Partai Gerindra sebanyak 7 orang, Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 6 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 6 orang, dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebanyak 5 orang yang masing-masing memiliki basis dukungan pada kelompok sosial tertentu.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode 2025–2030. Pemilihan Bupati (Pilbup) Sambas tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. KPU kabupaten Sambas menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 458.025 pemilih yang terdiri dari 224.399 laki-laki dan 233.626 perempuan yang tersebar di 19 kecamatan dengan total 1.007 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan pembagian generasi, pemilih tetap yang terdaftar paling banyak pada generasi Milenial sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Klasterisasi Usia Pemilih Pilkada 2024 di Kabupaten Sambas



Sumber: KPU Kabupaten Sambas, 2025 (diolah oleh peneliti, 2025)

Generasi *Pre-Baby Boomer* adalah generasi yang lahir sebelum tahun 1945 atau yang saat ini (per tahun 2025) berusia di atas 80 tahun. Generasi *Baby Boomer* adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1946-1964 atau yang saat ini berusia 61-79 tahun. Generasi X adalah mereka yang lahir antara tahun 1965-1980 atau yang saat ini berusia 45-60 tahun. Generasi Y atau Milenial

adalah generasi yang lahir pada tahun 1981-1996 atau yang saat ini berusia 44-29 tahun. Generasi Z lahir pada tahun 1997-2012 atau yang saat ini berusia 13-28 tahun. Sementara Generasi Alfa (*Alpha*) lahir pada tahun 2013-2024 atau yang saat ini berusia antara 1-12 tahun. Adapun generasi yang lahir setelahnya dinamai Generasi Beta (Balon, 2024). Berdasarkan presentase pada Gambar 2 di atas, berikut tabel mengenai jumlah pemilih tetap per generasi dan jenis kelaminnya.

Tabel 4. Jumlah Pemilih Tetap di Kabupaten Sambas Pada Pilkada 2024 Berdasarkan Klasterisasi Generasi dan Jenis Kelamin

No.	Generasi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	<i>Pre-Baby Boomer</i>	2.155	3.304	5.459
2.	<i>Baby Boomer</i>	25.719	30.025	55.744
3.	X	63.685	50.017	123.702
4.	Y (Milenial)	80.120	72.462	152.582
5.	Z	61.947	58.591	120.538

Sumber: KPU Kabupaten Sambas, 2025

Isu-isu strategis yang mengemuka dalam Pilkada Sambas 2024 meliputi pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan ekonomi perbatasan, dan penguatan pendidikan berbasis lokal. Sayangnya, berdasarkan data dari KPU Kabupaten Sambas (2025), tingkat partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Sambas pada Pilkada 2024 ini mengalami penurunan dibandingkan saat Pilpres dan Pileg 2024 yakni sebesar 9,99% (dari yang tadinya sebesar 74,68% menjadi 64,69%). Isu identitas tetap menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi preferensi pemilih, terutama di daerah yang memiliki sejarah panjang hubungan antaretnis. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik identitas di Sambas belum sepenuhnya surut, tetapi mulai bergeser ke arah yang lebih pragmatis dan rasional.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sambas 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi pemilih berada di atas 75%, menandakan antusiasme publik yang cukup tinggi terhadap proses demokrasi lokal. Kelompok pemilih muda (Gen Z dan milenial) menjadi segmen penting yang mulai diperhitungkan oleh para kandidat. Mereka tidak hanya menjadi target kampanye berbasis media sosial, tetapi juga menunjukkan partisipasi aktif dalam relawan digital dan kegiatan sosialisasi politik di lingkungan komunitas. Hal ini menegaskan adanya pergeseran kultur politik ke arah partisipasi yang lebih sadar informasi.

Hasil Pilkada Sambas 2024 menunjukkan kompetisi yang cukup ketat antara dua pasangan calon utama. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan yang mengusung tema pembangunan inklusif dan pemerataan ekonomi berhasil memenangkan suara mayoritas. Kemenangan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kekuatan mesin partai, tetapi juga oleh strategi komunikasi politik yang mampu menjangkau berbagai kelompok sosial termasuk kalangan minoritas. Keterlibatan kelompok minoritas dalam mendukung salah satu pasangan calon menjadi indikasi adanya proses integrasi politik yang lebih terbuka di tingkat lokal.

Dari sisi evaluasi penyelenggaraan, Pilkada Sambas 2024 relatif berjalan dengan aman dan kondusif tanpa konflik horizontal yang signifikan. Sinergi antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat berhasil menjaga stabilitas sosial selama tahapan berlangsung. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah catatan kritis seperti ketimpangan akses informasi di wilayah pedalaman dan praktik politik uang dalam skala terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Sambas masih dalam tahap konsolidasi serta perlunya penguatan tata kelola pemilu yang transparan dan partisipatif.

3. Menakar Orientasi Politik Minoritas di Kabupaten Sambas

Menakar orientasi politik minoritas di Kabupaten Sambas menjadi penting untuk memahami bagaimana kelompok-kelompok etnis dengan posisi demografis dan politik yang relatif kecil memaknai serta mengekspresikan pilihan politiknya dalam kontestasi lokal. Kabupaten Sambas,

dengan struktur masyarakat yang plural dan sejarah panjang interaksi antaretnis, menyediakan konteks sosial yang dinamis untuk melihat bagaimana preferensi politik warga minoritas terbentuk dan berubah yang dapat dilihat dari berbagai dimensi.

Pada dimensi kognitif, orientasi politik kelompok minoritas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2024 memperlihatkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan politik yang signifikan. Komunitas minoritas di Kabupaten Sambas kini semakin memahami mekanisme kerja sistem politik lokal, termasuk fungsi pemerintahan daerah dan peran strategis kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan publik. Mereka mulai menilai kandidat berdasarkan kualitas kepemimpinan, visi pembangunan, dan rekam jejak kinerja, bukan lagi semata-mata karena faktor kedekatan etnis atau afiliasi agama. Pemahaman ini menandai pergeseran orientasi dari politik berbasis identitas menuju politik berbasis rasionalitas dan kinerja, yang menempatkan minoritas sebagai aktor politik yang lebih otonom dan sadar terhadap kepentingan kolektif daerah.

Selain itu, afeksi politik kalangan minoritas juga terbentuk melalui pengalaman historis dan relasi sosial lintas etnis yang relatif harmonis di Sambas. Nilai-nilai kekerabatan, solidaritas, dan budaya gotong royong yang kuat antarwarga telah mengikis sebagian sekat emosional berbasis identitas. Akibatnya, simpati politik tidak lagi bersifat eksklusif kepada calon yang memiliki kesamaan etnis atau agama, melainkan lebih terbuka terhadap figur-figur yang dianggap mampu menjaga stabilitas sosial dan menjamin keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Lebih jauh, moderasi afektif ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya literasi politik emosional, yaitu kemampuan pemilih untuk mengelola perasaan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sektarian yang kerap muncul menjelang pemilihan umum (Dimdins, Montgomery, & Sandgren, 2023; Grahn & Thisell, 2024). Kalangan minoritas di Sambas terutama generasi muda memperlihatkan kemampuan untuk menyeimbangkan perasaan kebanggaan etnis dengan pertimbangan rasional terhadap kebijakan publik dan visi pembangunan daerah. Hal ini menandakan bahwa orientasi afektif mereka telah mengalami transformasi menuju kedewasaan politik yakni ketika preferensi emosional tidak meniadakan rasionalitas, melainkan justru memperkuat komitmen terhadap demokrasi yang berkeadaban dan inklusif.

Pada dimensi evaluatif, kalangan minoritas menilai bahwa demokrasi lokal yang ideal adalah demokrasi yang memberikan ruang representasi dan perlindungan hak yang setara bagi seluruh warga tanpa diskriminasi etnis maupun agama. Mereka cenderung mengapresiasi kandidat yang memiliki komitmen terhadap pembangunan yang merata, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta hubungan harmonis antarumat beragama.

Akibatnya, simpati politik tidak lagi bersifat eksklusif kepada calon yang memiliki kesamaan etnis atau agama, melainkan lebih terbuka terhadap figur-figur yang dianggap mampu menjaga stabilitas sosial dan menjamin keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat. Hal ini terlihat dari temuan lapangan ketika beberapa informan dari komunitas Tionghoa maupun Melayu menyatakan bahwa pilihan politik mereka pada Pilkada terakhir lebih didasarkan pada rekam jejak kandidat dalam menangani persoalan ekonomi dan pelayanan publik, bukan pada faktor kesamaan identitas.

Selain itu, wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Pemangkat dan Sambas mengonfirmasi bahwa hubungan antaretnis berjalan relatif harmonis, sehingga pertimbangan pemilih lebih diarahkan pada isu pragmatis seperti akses bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta kepastian keamanan wilayah perbatasan.

Temuan-temuan ini memperkuat bahwa orientasi politik warga cenderung bergeser dari orientasi identitas menuju orientasi kinerja kandidat. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada juga memperlihatkan bahwa kalangan minoritas memiliki pandangan kritis terhadap transparansi, netralitas penyelenggara, serta keadilan dalam proses kampanye. Mereka mengharapkan proses politik yang bebas dari diskriminasi dan politisasi identitas, serta menjunjung asas kesetaraan bagi semua warga. Kesadaran evaluatif ini tumbuh seiring dengan meningkatnya pengalaman politik dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

4. Literasi Politik: Penguatan Partisipasi dan Reduksi Politik Identitas di Kalangan Minoritas

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa orientasi politik kalangan minoritas di Sambas 2024 cenderung rasional-instrumental ketimbang primordial. Temuan ini sejalan dengan teori rational choice dalam ilmu politik yang menekankan bahwa pemilih membuat keputusan berdasarkan perhitungan manfaat pribadi atau kelompok, bukan semata-mata kesamaan identitas. Pengaruh tokoh komunitas tetap signifikan, menunjukkan adanya kombinasi antara *rational choice* dan *sociological model* yakni ketika jaringan sosial dan struktur komunitas mempengaruhi perilaku memilih.

Kalangan minoritas di Kabupaten Sambas memiliki peran penting dalam memperkaya dinamika politik lokal melalui keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk partisipasi sosial dan politik. Selain itu, literasi politik dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antara kelompok minoritas dan pemerintah daerah. Melalui pemahaman yang baik terhadap sistem politik dan mekanisme kebijakan publik, warga minoritas dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini membuka ruang dialog yang lebih setara antara warga dan penguasa lokal, serta mendorong munculnya politik kewargaan (*civic politics*) yang berbasis pada rasionalitas dan kepentingan bersama, bukan semata identitas kelompok (Heryanto, 2024).

Dengan demikian, peningkatan literasi politik bukan hanya berdampak pada perilaku pemilih individu, tetapi juga pada kualitas demokrasi lokal secara keseluruhan. Di Kabupaten Sambas, literasi politik yang berkembang secara inklusif dapat memperkuat partisipasi minoritas dalam Pilkada dan mengurangi potensi konflik berbasis identitas. Upaya pendidikan politik yang berkelanjutan, baik melalui lembaga pendidikan formal, komunitas sipil, maupun media lokal, menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang sadar hak politiknya dan mampu berpartisipasi secara rasional dalam kehidupan politik daerah.

Literasi politik juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan politik. Kelompok minoritas yang memiliki tingkat literasi politik tinggi akan lebih mampu memahami hak-hak politiknya, menavigasi sistem politik yang kompleks, dan menolak bentuk-bentuk marginalisasi politik (Karolčík, Steiner, & Čipková, 2025). Mereka dapat menilai kandidat berdasarkan kapasitas dan integritasnya, bukan berdasarkan tekanan sosial atau stereotip identitas.

Peningkatan literasi politik juga mendorong minoritas untuk lebih percaya diri dalam menyuarakan pandangan dan kepentingan politiknya di ruang publik. Dengan kemampuan menilai informasi secara kritis, mereka mampu membedakan antara janji politik yang realistis dan retorika yang manipulatif. Hal ini turut memperkuat posisi mereka sebagai aktor politik yang aktif, bukan sekadar penerima kebijakan. Dengan demikian, peningkatan literasi politik di kalangan minoritas dapat memperkuat kemampuan mereka dalam berpartisipasi politik secara setara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi politik kalangan minoritas di Kabupaten Sambas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersifat dinamis. Orientasi politik kalangan minoritas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2024 menunjukkan pergeseran yang signifikan dari pola politik identitas menuju politik rasional dan partisipatif. Berdasarkan dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif menurut kerangka Almond dan Verba, kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa dan komunitas non-Muslim di Sambas semakin memahami sistem politik lokal, bersikap positif terhadap simbol dan lembaga demokrasi, serta menilai kandidat secara objektif berdasarkan visi, integritas, dan kinerja. Hal ini membuktikan bahwa literasi politik di kalangan minoritas telah berkembang dan berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal yang inklusif dan berkeadilan. Orientasi politik yang lebih rasional ini tidak hanya memperkaya kualitas partisipasi elektoral, tetapi juga memperkuat posisi minoritas sebagai subjek aktif dalam pembangunan politik daerah. Rekomendasi dari limitasi yang disampaikan pada penelitian ini, yakni diperlukannya upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, partai politik, maupun organisasi masyarakat sipil,

untuk meningkatkan literasi dan partisipasi politik kelompok minoritas di Kabupaten Sambas. Program pendidikan politik yang inklusif, penyediaan akses informasi publik yang setara, serta pelibatan aktif minoritas dalam forum-forum kebijakan lokal akan memperkuat rasa memiliki terhadap proses demokrasi. Selain itu, partai politik dan kandidat perlu menghindari eksploitasi isu identitas dan lebih menonjolkan program kerja berbasis kebutuhan masyarakat lintas etnis dan agama sehingga Pilkada di masa mendatang dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat demokrasi substantif yang mengedepankan kesetaraan, toleransi, dan kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat Sambas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., & Sukmawati, U. S. (2019). Tradisi Kemponan dan Jappe' Dalam Masyarakat Melayu Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 15(1). <https://ejournal.iain-palangka.ac.id/index.php/jsam/article/view/1131/0>
- Apaut, Y., Bainus, A., & Kartini, D. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 14(2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/3167>
- Balon, R. (2024). An Explanation of Generations and Generational Changes. *Acad Psychiatry*, 48, 280–282. <https://doi.org/10.1007/s40596-023-01921-3>
- BPS Kabupaten Sambas. (2024). *Kabupaten Sambas dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Sambas. <https://sambaskab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/de4d028bc1c860f0272b3cc6/kabupaten-sambas-dalam-angka-2024.html>
- BPS RI. (2001). *Penduduk Kalimantan Barat Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dimdins, G., Montgomery, H., & Sandgren, M. (2023). Worldviews and Values as Bases for Political Orientations. *International Review of Social Psychology*, 36(1): 1, 1–16. DOI: <https://doi.org/10.5334/irsp.741>
- Fauzi, et al. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Etnis Minoritas Pasca Reformasi. *JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/41030>
- Grahn, M., & Thisell, T. (2024). Are minorities in politics held to a higher standard? Experimental & observational evidence from candidate selection. *Journal of European Public Policy*, 32(9), 2282–2306. <https://doi.org/10.1080/13501763.2024.2398770>
- Heryanto, G. G. (2024). *Membaca Lanskap Pemilu 2024: Perspektif Literasi Politik*. Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia
- Juliansyah, A. (2021). Hubungan Orientasi, Partisipasi Politik Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Walikota Kupang 2017. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sapientia/article/view/4971>
- Kafka, M. K. R., Prawira, F. R., Santoso, G., Nurhasanah, H., Pramono, J., Barkah, S., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 132–141. <https://doi.org/10.9000/jpt.v1i2.384>
- Karolčík, Š., Steiner, J., & Čipková, E. (2025). Politics and political literacy in education from the perspective of the public. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2457560>
- KPU Kabupaten Sambas. (2024). *Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024*. Facebook KPU Kabupaten Sambas. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=981185257375273&id=100064514239926&set=a.639327701561032>
- _____. (2025). *Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Sambas: Kajian Riset Data Pemilih dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Sambas*. Pontianak: CV AMS Pustaka

- Layungsari, S., Chotidjah, S., & Nurendah, G. (2024). Pengaruh Kepercayaan Politik Dan Kesadaran Politik Terhadap Intensi Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula. *Jurnal Psikologi Talenta*, 9(2). <https://ojs.unm.ac.id/talenta/article/view/57373>
- Mananta, R. (2017). *Menolak Lupa Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas, Dari Kota Singkawang ke Sambas*. Mister Pangalayo. <https://www.misterpangalayo.com/2017/07/perpindahan-ibu-kota-kabupaten-sambas-dari-singkawang.html>
- Mardiyanti, L. R., Ramadhan, I., & Kurnia, H. (2023). Profil melayu Sambas dalam konteks asal-usul, tradisi dan budaya di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.61476/js62h161>
- Meilinda, Y. (2021). Preferensi Politik Pemilih Milenial Dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 3(1). <https://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/view/163>
- Nugroho, A. T., Tobing, D. H., & Supriyadi, S. (2022). Preferensi Ideologi dan Perilaku Politik Pemilih pada Pilpres 2019: Asosiasi antara Openness to Experience, Conscientiousness, Agreeableness, dan Otoritarianisme Sayap Kanan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 9(1). <https://jurnal.harianregional.com/psikologi/full-71305>
- Nurdin, J., Hamim, U., & Mahmud, R. (2023). Orientasi Politik Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024 Di SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/479>
- Purwana, B. H. S. (2018). Toponimi Sambas : Legenda Persaudaraan Abadi Orang Dayak dengan Orang Melayu Sambas. *JANTRA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 13(1). <https://jantra.kemdikbud.go.id/index.php/jantra/article/view/62/39>
- SPNK THC. (2015). *Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik: Studi Kasus Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat*. Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) The Habibie Center (THC). <https://catalogue.nla.gov.au/catalog/7013091>
- Suhaida, D. (2015). Orientasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam Penguatan Komitmen Kebangsaan. *Khazanah Pendidikan*, 8(2). <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/view/671>
- Supriyadi, A. (2019). Orientasi Politik Pemilih Pemula Mahasiswa UNISRI Dalam Pemilukada Jawa Tengah 2018. *Research Fair Unisri*, 3(1). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/rsfu/article/view/2590>
- Yuliani, K., & Ardianto, H. T. (2020). Bagaimana Kandidat Minoritas Memenangkan Pilkada: Analisis Strategi Politik dalam Bingkai Bourdieusian. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 58-69. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7476>